


KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

21 Mei 2022

Meski Raih WTP, Pemprov NTB Dapat Catatan Ini dari BPK

Editor: Redaksi 5  21 Mei 2022



DAPAT WTP: Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan keterangan terhadap temuan dari BPK di Gedung DPRD NTB, Jumat (20/5). (Didit/Lombok Post)

MATARAM-Pemberian bantuan sosial (bansos) dan hibah dari Pemprov NTB jadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini mengiringi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemprov yang ke-11.

"Permasalahan yang ada masih pada koridor kewajaran. Tapi tetap perlu mendapatkan perhatian," kata Kepala BPK NTB Ade Iwan Rusmana, Jumat (20/5).

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2022 terhadap kinerja Pemprov NTB tahun 2021, BPK kembali menyinggung soal program jaring pengaman sosial (JPS) yang dilaksanakan anggota DPRD NTB pada 2020. Kali ini terkait dengan penentuan kelompok penerima bantuannya.

Ade mengatakan, penentuan sasaran penerima program tidak berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi melalui usulan pada kegiatan reses anggota DPRD NTB. Sehingga berdampak pada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Auditor kemudian melakukan uji petik terhadap 460 orang yang terbagi dalam 78 kelompok penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 279 orang atau sekitar 60 persen tidak masuk dalam DTKS.

Dari pengujian lebih lanjut untuk bansos terkait penanggulangan kemiskinan daerah, BPK menemukan penerima yang tidak layak diberikan bantuan. Ada juga pemotongan bantuan berupa uang yang terjadi di lapangan. "BPK merekomendasikan agar dilakukan perbaikan kinerja," ujarnya.

Selain itu, data ganda dalam penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi peserta BPJS Kesehatan juga masuk dalam temuan. "Karena provinsi mengalokasikan dalam APBD, ada juga penerima yang sama tapi dari APBN," sebut Ade. BPK menemukan 8.270 jiwa data ganda dalam PBI. Hingga pemeriksaan berakhir, telah dilakukan penonaktifan data ganda sebanyak 2.888 jiwa. "Permasalahan ini pemprov diminta koordinasi dengan BPJS, untuk validasi data kepesertaan ganda," kata Ade.

Soal bansos dan hibah yang masuk dalam temuan BPK, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyebutnya sebagai masalah yang terjadi hampir di semua daerah. Meski ia juga menjanjikan akan ada perbaikan ke depannya.

Kata gubernur, sistem demokrasi di Indonesia menuntut pemerintah dan pejabat publik di dalamnya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. "Misalnya timses kita, sudah berjuang buat kita, *gak* dikasih nanti marah. Setelah dikasih, karena (mungkin) sedikit, pertanggungjawabannya tidak ada," kata Zul.

Zul beralasan pemerintah tidak mungkin mengontrol setiap penerima bantuan. Apalagi jika jumlahnya banyak. Karena itu, salah satu solusinya adalah dengan berkoordinasi bersama BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum, agar setia bansos yang diberikan tidak melanggar aturan. "Kan tidak bisa kita kontrol setiap orang. Ditanya satu-satu bantuannya digunakan untuk apa. Jadi saya kira jangan terlampau membesarkan catatan, seperti (mau) hari kiamat saja," tutur berseloroh.

Temuan dalam LHP BPK diakui gubernur menunjukkan masih adanya kekurangan dalam hal pertanggungjawaban. "Banyak bantuan kita, terutama yang menyangkut rakyat itu abai di laporan tanggung jawabnya," kata gubernur. Karena itu, Zul menjanjikan akan ada perbaikan sesuai dengan rekomendasi dan waktu yang diberikan BPK. "Saran BPK harus ditindaklanjuti. Berat, tapi pasti bisa," tandasnya. **(dit/r5)**